POHON KINERJA

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG

Sumber Data:

1. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019 -2024
2. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Visi	**Kabupaten Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera (Anyar Gress)**

Misi	**Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Tujuan :	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	
Indikator Kinerja :	3	Laju Pertumbuhan ekonomi

Sasaran :	Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	
Indikator Kinerja :	3.9	PDRB per kapita

Kepala Perangkat Daerah : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

Sasaran PD : Meningkatnya produktivitas perikanan

Sasaran PD :	Meningkatnya produktivitas perikanan	
Indikator Kinerja :	3.9.1	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)

Kepala Bidang Budidaya Perikanan

3.9.1.1	Persentase peningkatan produksi benih ikan
3.9.1.2	Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi
3.9.1.3	Persentase peningkatan produksi ikan hias
3.9.1.4	Persentase Sungai dan Genangan Air Lainnya Yang Menjadi Kawasan Konservasi

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3.9.1.1.1	Cakupan kelompok yang terfasilitasi pemberdayaan
3.9.1.1.1.1	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
3.9.1.1.1.2	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan
3.9.1.1.1.3	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya
3.9.1.1.1.4	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

3.9.1.2.1	Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.9.1.2.1.1	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.9.1.2.1.2	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.9.1.2.1.3	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.9.1.2.1.4	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
3.9.1.2.1.5	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

3.9.1.3	Jumlah lokasi pengawasan sungai dan genangan air lainnya
3.9.1.3.1	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3.9.1.5	Angka konsumsi ikan

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

3.9.1.5.1	Persentase Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (KUSUKA)
3.9.1.5.1.1	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

3.9.1.5.2	Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil Perikanan
3.9.1.5.2.1	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.9.1.5.3	Persentase fasilitasi penyediaan bahan baku pengolahan ikan
3.9.1.5.3.1	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.9.1.5.3.2	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi

Kesekretariatan

3.9.1.6	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
3.9.1.7	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah

Kepala Sub Bagian Program

3.9.1.7.1	Jumlah dokumen yang tersusun
3.9.1.7.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.9.1.7.1.2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kepala Sub Bagian Keuangan

3.9.1.7.2	Jumlah laporan keuangan yang disusun
3.9.1.7.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
3.9.1.7.2.2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.9.1.6.1	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
3.9.1.6.1.1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.9.1.6.2	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan
3.9.1.6.2.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
3.9.1.6.2.2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
3.9.1.6.3	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.9.1.6.3.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.9.1.6.3.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
3.9.1.6.4	Persentase pemeliharaan barang yang dilaksanakan
3.9.1.6.4.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
3.9.1.6.4.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
3.9.1.6.4.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
3.9.1.6.4.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sasaran PD : Meningkatnya produktivitas peternakan

Sasaran PD :	Meningkatnya produktivitas peternakan	
Indikator Kinerja :	3.9.2	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)

Kepala Bidang Peternakan

3.9.2.1	Persentase peningkatan produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)
3.9.2.2	Persentase peningkatan produksi telur
3.9.2.3	Persentase peningkatan produksi susu
3.9.2.4	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi Peternakan
3.9.2.5	Persentase pembinaan kelompok ternak

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

3.9.2.1.1	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan
3.9.2.1.1.1	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3.9.2.1.1.2	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

UPTD Pembibitan Ternak

3.9.2.3.1	Presentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3.9.2.3.1.1	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.9.2.2.1	Fasilitasi Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3.9.2.2.1.1	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar
3.9.2.2.1.2	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.9.2.5.1	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Ternak
3.9.2.5.1.1	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
3.9.2.5.1.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Pembangunan Prasarana Pertanian

3.9.2.4.1	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan yang terbangun/terpelihara
3.9.2.4.1.1	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
3.9.2.4.1.2	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
3.9.2.4.1.3	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.9.2.6	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
3.9.2.7	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
3.9.2.8	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.4.2.6.1	Persentase pelayanan pencegahan penyakit hewan menular
3.4.2.6.1.1	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veeriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.9.2.6.5	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
3.9.2.6.5.1	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.9.2.7.1	Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.9.2.7.1.1	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3.9.2.7.1.2	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

3.9.2.8.1	Persentase pengawasan peredaran obat hewan
3.9.2.8.1.1	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi

Kepala UPTD Laboratorium dan RPH

3.9.2.6.2	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3.9.2.6.2.1	Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
3.9.2.6.3	Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.9.2.6.3.1	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kepala UPTD Puskeswan

3.9.2.6.4	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3.9.2.6.4.1	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

Mungkid, September 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

JONI INDARTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741204 199311 1 001

Cascading Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029

URUSAN	VISI	MISI	ISU STRATEGIS DAERAH	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	FORMULA INDIKATOR TUJUAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TUJUAN DAERAH	MASALAH POKOK DAERAH	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN DAERAH	FORMULA INDIKATOR SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN DAERAH	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ISU STRATEGIS PD	TUJUAN RENSTRA PD	INDIKATOR TUJUAN PD	FORMULA TUJUAN PD	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TUJUAN PD	MASALAH POKOK PD	SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA INDIKATOR SASARAN PD	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI RENSTRA PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	AKAR MASALAH PD	ARAH KEBIJAKAN PD	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELUARAN/OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Perikanan dan Kelautan	Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress	Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memajukan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan daerah dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal yang terdidik dan terlatih	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	tingkat kecepatan ekonomi daerah tumbuh dalam jangka waktu satu tahun, dihitung dalam persen	Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja hulu hingga hilirnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	PDRB per kapita	Nilai PDRB Kabupaten Magelang pada tahun t dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun t	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang pada tahun t dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun t di Kabupaten Magelang, yang menunjukkan rata-rata pendapatan masyarakat per individu dalam setahun	Meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah	Meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas	Belum optimalnya nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun-n (Perhitungan BPS)	Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Produktivitas dan daya saing usaha perikanan belum optimal	Meningkatnya produktivitas perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	(Persentase peningkatan produksi benih ikan pada tahun t + Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi pada tahun t + Persentase peningkatan produksi ikan hias pada tahun t) : 4	(Persentase peningkatan produksi benih ikan pada tahun t di Kabupaten Magelang + Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi pada tahun t di Kabupaten Magelang + Persentase peningkatan produksi ikan hias pada tahun t di Kabupaten Magelang) : 3	Belum optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	Persentase peningkatan produksi benih ikan	((Jumlah produksi ikan (benih) pada tahun t- Jumlah produksi ikan (benih) pada tahun 2024)/Jumlah produksi ikan (benih) pada tahun 2024))x100%	Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik	Mengoptimalkan keberdayaan dan kemampuan pengelolaan pembudidaya ikan kecil	**Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan kelompok yang terfasilitasi pemberdayaan	Persentase cakupan kelompok yang terfasilitasi pemberdayaan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																													Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi	((Jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun t- Jumlah produksi ikan kosumsi pada tahun 2024)/Jumlah produksi ikan kosumsi pada tahun 2024))x100%	Kemampuan teknis kelompok pembudidaya ikan belum optimal		**Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil**	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah kelompok yang terfasilitasi sertifikat CPIB dan CBIB (RTP/Kelompok)	Dinas Peternakan dan Perikanan
																													Persentase peningkatan produksi ikan hias	((Jumlah produksi ikan hias pada tahun t- Jumlah produksi ikan hias pada tahun 2024)/Jumlah produksi ikan hias pada tahun 2024))x100%	Terbatasnya jaringan kemitraan usaha perikanan		**Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah pokdakan pembudidaya ikan yang terfasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Kemampuan manajemen lembaga perikanan masih rendah		**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha**	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Masih rendahnya teknologi pakan ikan		**Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**	Terlaksananya Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Belum optimalnya prasarana di kawasan budidaya perikanan (jaringan irigasi perikanan, jalan produksi perikanan, pasar benih/ikan konsumsi)	Mengoptimalkan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan sarana prasarana budidaya ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Keterbatasan prasarana pengolahan/pemasaran produk perikanan		**Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Pengetahuan SDM perikanan tentang kesehatan ikan masih terbatas		**Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Perikanan (unit)	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana pembudidayaan ikan pada UPTD PIAT (unit)	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																									Belum optimalnya pengawasan sumberdaya perikanan	Meningkatkan pengawasan sumberdaya perikanan	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	Terjaganya Kelestarian Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Menjadi Kawasan Konservasi	(Jumlah perairan umum yang dilakukan pengawasan/jumlah perairan umum yang ada)x100%	Masih dilakukan penangkapan ikan dengan cara illegal fishing	Mengoptimalkan pengawasan sumberdaya perikanan di sungai dan genangan air lainnya	**Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan sungai dan genangan air lainnya	Jumlah lokasi pengawasan sungai dan genangan air lainnnya (lokasi)	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan pendataan perikanan tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan
																									Angka konsumsi ikan masih rendah	Meningkatkan kualitas dan jenis produk olahan hasil perikanan serta pemasarannya	**Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Kenaikan Angka konsumsi ikan	(Angka Konsumsi Ikan pada tahun t - Angka Konsumsi Ikan pada tahun t-1)	Masih rendahnya mutu produk olahan hasil perikanan	Mengoptimalkan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	**Keg. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Persentase Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Terbatasnya jaringan pemasaran/promosi perikanan	Mengoptimalkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah peserta bintek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang)	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Kesadaran, pengetahuan gizi ikan dan daya beli masyarakat masih rendah	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas bahan baku dan hasil olahan produk perikanan	**Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi penyediaan bahan baku pengolahan ikan	Persentase fasilitasi pemasaran produk perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Dinas Peternakan dan Perikanan
Pertanian Sub Sektor Peternakan	Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress	Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memajukan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan daerah dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal yang terdidik dan terlatih	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	tingkat kecepatan ekonomi daerah tumbuh dalam jangka waktu satu tahun, dihitung dalam persen	Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja hulu hingga hilirnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	PDRB per kapita	Nilai PDRB Kabupaten Magelang pada tahun t dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun t	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang pada tahun t dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun t di Kabupaten Magelang, yang menunjukkan rata-rata pendapatan masyarakat per individu dalam setahun	Meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah	Meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas	Belum optimalnya nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun-n (Perhitungan BPS)	Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Produktivitas dan daya saing usaha peternakan belum optimal	Meningkatnya produktivitas peternakan	Persentase Peningkatan produksi komoditas peternakan	(Persentase peningkatan produksi daging (ruminansia dan non ruminansia) + Persentase peningkatan produksi telur + Persentase peningkatan produksi susu) : 3	(Persentase peningkatan produksi daging (ruminansia dan non ruminansia) pada tahun t di Kabupaten Magelang + Persentase peningkatan produksi telur pada tahun t di Kabupaten Magelang + Persentase peningkatan produksi susu pada tahun t di Kabupaten Magelang) : 3	Belum optimalnya Penyediaan dan Pengembangan sarana sektor pertanian sub sektor peternakan	Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan sarana sektor pertanian sub sektor peternakan	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	((Jumlah produksi daging (ruminansia dan non ruminansia pada tahun t- Jumlah produksi daging (ruminansia dan non ruminansia) pada tahun 2024)/Jumlah produksi daging (ruminansia dan non ruminansia) pada tahun 2024))x100%	Kualitas sumberdaya genetik (SDG) ternak dalam daerah masih rendah	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Keg. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																													Persentase peningkatan produksi telur	((Jumlah produksi telur pada tahun t- Jumlah produksi telur pada tahun 2024)/Jumlah produksi telur pada tahun 2024))x100%			**Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Peternakan dan Perikanan
																													Persentase peningkatan produksi susu	((Jumlah produksi susu pada tahun t - Jumlah produksi susu pada tahun 2024)/Jumlah produksi susu pada tahun 2024))x100%			**Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman**	Terlaksananya Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Masih rendahnya kepemilikan sapi perah, sapi potong, kambing dan domba	Mengoptimalkan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Keg. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Fasilitasi Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Kemampuan pengelolaan usaha SDM Peternakan masih rendah		**Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak**	Terlaksananya Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Kurang optimalnya penanaman lahan hijauan pakan ternak		**Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan**	Terlaksananya Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Masih rendahnya teknologi pakan ternak						
																									Belum optimalnya Penyediaan dan Pengembangan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan	Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Produksi Peternakan (%)	(Jumlah prasarana peternakan yang terpenuhi pada tahun t : jumlah kebutuhan prasarana peternakan pada tahun t) x 100%	Keterbatasan prasarana peternakan kelompok ternak	Mengoptimalkan pelayanan prasarana dan pengembangan wilayah peternakan	**Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan yang terbangun/terpelihara	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan yang terbangun/terpelihar	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Keterbatasan prasarana pasar hewan, puskeswan dan rumah potong hewan		**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Jalan produksi peternakan yang terbangun	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah RPH yang terpelihara	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Pasar hewan dan Puskeswan yang terpelihara	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Belum optimalnya pelayanan Inseminasi Buatan	Mengoptimalkan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	**Keg. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Presentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah laporan akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi Buatan (ekor)	Dinas Peternakan dan Perikanan
																									Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Mengoptimalkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	((Jumlah surveillance tahun n : jumlah surveillance tahun n-1) x 100% + (jumlah PAH yang ASUH tahun n : jumlah PAH yang ASUH tahun n-1) x100% + (jumlah pencegahan penyakit hewan menular dan zoonosis tahun n : jumlah pencegahan penyakit hewan menular dan zoonosis tahun n-1) x 100%) : 3	Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular	Mengoptimalkan kualitas kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	**Keg. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pencegahan penyakit hewan menular	Persentase pelayanan pencegahan penyakit hewan menular	Dinas Peternakan dan Perikanan

URUSAN	VISI	MISI	1SU STRATEGIS DAERAH	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	FORMULA INDIKATOR TUJUAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TUJUAN DAERAH	MASALAH POKOK DAERAH	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN DAERAH	FORMULA INDIKATOR SASARAN DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN DAERAH	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	1SU STRATEGIS PD	TUJUAN RENSTRA PD	INDIKATOR TUJUAN PD	FORMULA TUJUAN PD	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TUJUAN PD	MASALAH POKOK PD	SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA INDIKATOR SASARAN PD	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI RENSTRA PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	ARAH MASALAH PD	ARAH KEBIJAKAN PD	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KELUARAN/OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
																																	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Belum optimalnya pelayanan rumah potong hewan	Menggotmasikan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Keg. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Belum optimalnya fungsi pelayanan dan pengawasan paskerwan dan pasar hewan		**Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**	Terlaksananya Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Laporan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terlaksananya Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah Laporan Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Belum optimalnya pengawasan penyedia bahan pangan asal hewan (PAH) yang ASUH (aman sehat halal dan utuh)	Menggotmasikan Pelaksanaan dan Pengawasan Penyuratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Keg. Penerapan dan Pengawasan Penyuratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Penyuratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Belum optimalnya kampanye bahan pangan ASUH		**Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan**	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Masih belum optimalnya pengujian laboratorium kesehatan hewan dan ikan		**Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Dokumen Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Belum optimalnya pengawasan penyedia bahan pangan asal hewan (PAH) yang ASUH (aman sehat halal dan utuh)		**Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan**	Terlaksananya Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Laporan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Belum optimalnya pengawasan pemotongan hewan qurban						
																									Belum optimalnya pengawasan poultry shop, pet shop, toko obat	Menggotmasikan pengawasan peredaran obat hewan	**Keg. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**		Persentase pengawasan peredaran obat hewan	Persentase pengawasan peredaran obat hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
																																	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Jumlah Laporan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Dinas Peternakan dan Perikanan
																									Belum optimalnya penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan	Meningkatkan penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan	**Program Penyuluhan Pertanian**	Meningkatnya penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan	Persentase penduduk kelompok ternak	(Jumlah kelompok ternak yang dibina : jumlah kelompok x 100%	Belum optimalnya perasan dan pemberdayaan penyuluhan peternakan	Menggotmasikan pelaksanaan penyuluhan peternakan	**Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Pasilitasi Pembinaan Kelompok Ternak	Pasilitasi Pembinaan Kelompok Ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Meningkatkan kapasitas SDM peternakan		**Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah kelompok usaha peternakan yang dibina	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Kemampuan teknis SDM Peternakan masih rendah		**Sub Keg. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian**	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang direalisasi	Dinas Peternakan dan Perikanan
																															Kemampuan manajemen kelbaga peternakan masih rendah						

Mungkid, September 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG

JONI INDARTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741204 199311 1 001